

# PERAN PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DALAM MISI KEAMANAN DI LEBANON 2006-2012

**Hamdy Maulana**

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
hamdymaulana19@gmail.com

**ABSTRAK** — Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu terjadinya perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan subjek penelitian ini yaitu Agus Harimusti Yudhoyono yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda XXIII-A sebagai pasukan perdamaian PBB.

**Kata Kunci** — Konflik, Lebanon, Israel, Pasukan Perdamaian

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu

terjadinya perang. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya dan ikut terlihat dalam berbagai upaya untuk menjaga perdamaian dan mengatasi konflik antar negara-negara di dunia.

Berkaitan dengan peranan Indonesia pada penyelesaian konflik luar negeri, menurut Setiawati ada empat peranan yang dapat diambil Indonesia dalam penyelesaian suatu konflik antar Negara atau kelompok, yaitu sebagai: *pertama* mediator atau penengah pihak yang berkonflik, *kedua* fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, *ketiga* partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencegah supaya tidak muncul konflik baru misal sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan sebagai *keempat* justifikator yaitu memberi justifikasi penyelesaian konflik [1].

Dalam hal penyelesaian konflik antara negara-negara Arab-Israel, Indonesia telah menunjukkan peranannya terutama sebagai partisipan atau pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Sinai Pasca Perang Sinai 1956 yang tergabung di dalam UNEF (*United Nations Emerging Forces*), dan ke Lebanon khususnya setelah serangan Israel atas Lebanon Selatan di tahun 2006 yang kemudian tergabung

dalam pasukan Perdamaian PBB UNIFIL (*United Nations Interim Forces in Lebanon*).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 85%, Indonesia merasa memiliki kedekatan hubungan dengan Lebanon maupun dengan negara-negara Arab lainnya yang merupakan negara tempat lahirnya Agama Islam. Selain itu, keteritakatan Indonesia dengan Lebanon muncul dikarenakan Lebanon merupakan salah satu dari beberapa negara Arab (Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, dan negara Liga Arab) yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adanya kedekatan secara agama dan historis inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa perlu membantu Lebanon dan negara-negara Arab yang lain dalam menyelesaikan berbagai konflik baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara yaitu kota Shlomi dan juga menembakan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (*Israeli Defence Force*). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkannya dua tentara lainnya (Ehud Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortil secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama.

Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Menurut pejabat Israel diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berencana melakukan penukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan Operasi Komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari Amerika Serikat, sebagai

penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel yang disandera. Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu 48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Di saat yang sama, milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Namun, Israel sejak awal menolak berkompromi, dan kemudian melancarkan serangan ke sejumlah kamp milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai potensial untuk melarikan Kopral Gilad Shalit dari tempat penyergapannya di selatan Gaza ([www.globalresearch.ca](http://www.globalresearch.ca)).

Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan tentara Israel, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha meningkatkan aksi militernya untuk membebaskan anggotanya. Selain dari darat, militer Israel menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni kelompok Hizbullah hancur. Jembatan di wilayah Akkar, beberapa tempat di lembah Bekaa, serta ruas jalan dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel). Akibatnya distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia dibawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya kini kehilangan tempat tinggal [2].

Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakburah dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk dan 12 lainnya luka-luka di Desa Al-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di

Nakoura, Lebanon Selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel [2].

Mengenai konflik yang terjadi di Lebanon tersebut, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian ke Lebanon tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Disamping itu platform politik luar negeri bebas aktif memberikan dorongan agar Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian yang digelar secara internasional pada masa tersebut memiliki arti penting sebagai implementasi dari nilai politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.

Arti penting pengiriman pasukan dalam misi perdamaian PBB juga terkait dengan pendekatan terhadap masyarakat di negara dimana misi tersebut dilaksanakan. Kondisi ini terkait dengan tugas yang diemban tidak dapat dilepaskan dengan interaksi diantara pasukan TNI dengan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan) (Kemelu.go.id)

Keberadaan pasukan TNI di luar negeri dalam misi perdamaian secara tidak langsung merupakan representasi dari Indonesia sebagai sebuah negara. Keberadaan dari pasukan TNI sebagai bagian dari misi perdamaian PBB telah membuka sebuah peluang besar untuk menjembatani konektivitas sosial antara TNI sebagai representasi dari Indonesia dengan masyarakat dan kontingen angkatan bersenjata

dari negara lain yang tergabung dalam misi PBB tersebut.

Salah satu wilayah dimana pasukan TNI secara reguler ditempatkan adalah di Lebanon Selatan, dimana dalam upaya pemeliharaan perdamaian pasukan TNI memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal maupun dengan kontingen pasukan penjaga perdamaian dari negara lain. Kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di Lebanon Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh TNI. Interaksi yang dilakukan oleh TNI dengan masyarakat di Lebanon Selatan menghasilkan sebuah penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya untuk mendapatkan penerimaan serta pengelolaan terhadap interaksi tersebut menjadi sebuah fenomena tersendiri baik dikalangan kontingen UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut terkait dengan sulitnya kontingen UNIFIL dari negara lain untuk dapat diterima secara baik serta oleh masyarakat di Lebanon Selatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai:

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan kontribusi permasalahan politik luar negeri khususnya yang berkaitan

dengan peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri yang berkaitan upaya penyelesaian konflik antar negara atau kelompok.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Hal ini berbeda dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut pemaparan beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan konflik luar negeri:

*Pertama*, penelitian Rachmat yang bertujuan untuk menganalisis praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL. Hasil penelitian menemukan bahwa Diplomasi Publik yang saat ini tengah gencar dijalankan oleh berbagai negara di dunia dengan beragam variasi instrumen maupun metode membuat Indonesia perlu untuk menyadari arti penting dari praktek diplomasi publik. Salah satu praktek diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian dibawah payung PBB. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini tidak hanya memberikan signifikansi terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang dapat meningkatkan citra sebuah negara, namun juga dalam upaya untuk memperkenalkan diri di negara dimana misi tersebut dijalankan serta kepada negara-negara lain yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB [3].

*Kedua*, penelitian Sirmareza yang membahas tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah naval diplomacy. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan *naval diplomacy* Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *naval*

*diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai *middle power*. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitas kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangkan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi signifier prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal [4].

*Ketiga*, penelitian Hutabarat yang membahas tentang partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan

yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama [5].

Keempat, penelitian Islamiyah dan Trilaksana yang bertujuan untuk mengetahui (1) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, (2) Bagaimana implementasi kebijakan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, dan (3) Bagaimana dampak kebijakan PBB, bagi Palestina maupun Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fattah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan [6].

## F. Kerangka Teoritik

*Peacekeeping* adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB untuk membantu menyelesaikan konflik bersenjata. *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) adalah operasi *Peacekeeping* PBB yang pertama. Operasi tersebut terdiri atas pengamat militer tidak bersenjata (*unarmed military observers*) yang dikirim ke Palestina pada bulan Juni 1948 untuk mengawasi kesepakatan yang dilakukan oleh Count Bernadotte dalam perang pertama antara Israel dan Arab. Langkah utama dilakukan saat pasukan bersenjata PBB (*the United Nations Emergency Force* atau UNEF) yang ditugaskan di Mesir akibat serangan Anglo-French-Israeli terhadap negara tersebut bulan Oktober 1956.

*Peacekeeping* dapat disimpulkan dalam 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Pertama, *peacekeeping operation* adalah operasi PBB. PBB yang menyebabkan

*peacekeeping operation* dapat diterima negara anggota dimana keberadaan pasukan asing berada di wilayah kawasan negara tersebut.

2. Kedua, *peacekeeping operation* selama ini dapat dilakukan dengan adanya “*consent of the parties to the conflict in question*”. Selain itu, misi dapat berhasil dengan tetap berlanjutnya “*consent*” dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bertikai.
3. Ketiga, *peacekeepers* harus bersikap “*impartial*” di antara kelompok yang ada. Keberadaan Pasukan PBB tidak berupaya memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
4. Keempat, prinsip terkait dengan kebutuhan pasukan bagi UN *Peacekeeping Operation*. Charter PBB menyatakan bahwa negara anggota terikat dengan DK PBB untuk berkomitmen dalam penyediaan pasukan. Prinsip kelima berkaitan dengan “*use of force*”. Lebih dari setengah *peacekeeping operation* sebelum tahun 1988 hanya terdiri dari pengamat militer tidak bersenjata. Namun saat pertempuran bersenjata terjadi, prinsipnya adalah *use of force* dilakukan seminimal mungkin dan hanya boleh dilakukan dalam skema pembelaan diri (*fire should be opened only in self-defence*).

UN *peacekeeping* membantu negara-negara yang terpecah akibat konflik dan mengupayakan terwujudnya kondisi bagi perdamaian berkelanjutan. *Peacekeeping* telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif bagi PBB guna membantu host countries melalui masa yang sulit dari fase konflik menuju perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kekuatan yang unik, termasuk “*legitimacy, burden sharing, and an ability to deploy and sustain troops and police*” dari seluruh dunia; melakukan integrasi dengan *civilian peacekeepers*; hingga “*advance multidimensional mandates*”. UN *peacekeepers* menyediakan keamanan dan dukungan politik dan “*peacebuilding support*” untuk membantu negara melewati transisi dari konflik menuju perdamaian.

Terdapat lima motivasi yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk memberikan

kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu:

1. Politik. Partisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara dalam memenuhi tujuan politiknya. Sejumlah negara mendapatkan penghargaan dan otoritas dalam institusi internasional, khususnya PBB, yang memungkinkannya menyuarkan isu kemanan internasional [7]. Terdapat beberapa alasan politik mengapa negara melakukan kontribusi pada pasukan PBB, antara lain tekanan atau persuasi oleh negara sekutu, negara besar, atau Sekjen PBB, dan persepsi bahwa kontribusi pada pasukan PBB. memperkuat “*national prestige*” negara atau mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB [8].
2. Ekonomi. Argument utamanya adalah insentif ekonomi merupakan alasan utama bagi kontribusi Pasukan PBB. Salah satu elemen utama dari argumen ini adalah adanya sistem pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan pasukan PBB. Namun dalam pertimbangan finansial ini, perlu didefinisikan terkait siapa saja yang memperoleh manfaat.
3. Keamanan. Operasi penjaga perdamaian PBB tidak selalu diasosiasikan dengan pertahanan nasional atau kepentingan utama keamanan nasional. Negara biasanya memiliki pandangan bahwa penyediaan pasukan PBB akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas [8]. Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk memberikan kontribusi Pasukan PBB. Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan dimana negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.
4. Institusi. Partisipasi dalam Pasukan PBB dapat berakar dari motivasi yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, sektor

keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara. Keputusan untuk terlibat dalam operasi PBB biasanya diambil dalam konteks hubungan sipil-militer [7]. Terdapat juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan bersenjata berkaitan dengan kontribusi negara tersebut pada operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga melihat operasi perdamaian PBB sebagai suatu hal yang menarik karena memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personel terkait, pandangan lain terkait hal ini adalah bahwa ini merupakan salah satu upaya “militer sibuk di luar negeri daripada terlibat dalam urusan domestik” suatu negara, atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara bagi sebagian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki prestige setelah Perang Dingin. Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.

Norma. Negara memberikan kontribusi pada Pasukan PBB dapat didasarkan pada alasan normatif. Alasan ini khususnya untuk “*self-images*” sebagai “*global good Samaritans*”, “*good international citizens*”, atau sebagai anggota grup “*non-aligned*” dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni “*great power*”, atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakukan. sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai “*legitimate system*” dari mana manajemen konflik mengharapkan peran pendukung sebagai “*good international citizen*”. Indonesia dalam perannya sebagai kontributor, secara normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian PBB yang sejalan dengan konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. India memandang PBB sebagai suatu alternatif terhadap *great power hegemony* dan instrumen “*nonaligned approach*” terhadap keamanan dan perdamaian. Pandangan ini juga tampak dalam keterlibatan Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

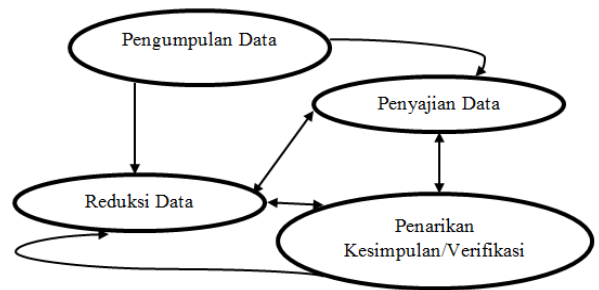
## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya [9]. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Subjek penelitian dibutuhkan peneliti untuk mencari data beserta informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan subjek tunggal yaitu Agus Harimusti Yudhoyono yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda XXIII-A sebagai pasukan perdamaian PBB.

Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman [10]. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Analisis Interaktif Miles dan Huberman

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiawati, Siti Mutiah. Dilemma Indonesia dalam Menjalankan Peranan Penyelesaian Konflik Timur Tengah. *Artikel Seminar Nasional*. 2016
- [2] Yulianto, Ari Mayor. *Lebanon Pra dan Pasca Perang 34 Hari Israel-Hizbullah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2010.
- [3] Rachmat, Angga Nurdin. Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 12 No 1, pp 1-14. 2016.
- [4] Sirmareza, Trio. Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force In Lebanon. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol 3 No 1, pp 1-21. 2017.
- [5] Hutabarat, Leonard F. Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 11 No 1, pp 47-65. 2015.
- [6] Islamiyah, Nur., Trilaksana, Agus. Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Jurnal. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* Vol 4, No.1, pp 902-916. 2016.
- [7] Sotomayor, Arturo C. Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its. 2010.
- [8] Findlay, Trevor. *Challenges for the New Peacekeepers*, Oxford University Press / SIPRI, Oxford. 1996.
- [9] Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- [10] Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* edisi kedua. Jakarta: Erlangga. 2007.